

LAPORAN TUGAS AKHIR
PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR*
***MONEY* PADA KANTOR PERTANAHAN**
KABUPATEN MOJOKERTO



Oleh :

Diana Putri Hardianti

NPM : 19.1.03.02056

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA SURABAYA

2022

**PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat,
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md. AK.)
Program Studi Diploma Tiga Akuntansi



**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA SURABAYA**

2022

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat,
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md. Ak.)
Program Studi Diploma Tiga Akuntansi

Disusun Oleh :

DIANA PUTRI HARDIANTI

NPM : 19.1.03.02056

Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Diterima
Pada Tanggal 13 Juli 2022

Oleh :

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi D-3 Akuntansi



Dr. Lilis Ardini, S.E., M.Si., Ak., CA. Dra. Dini Widyawati, M.Si., Ak., CA.

Ketua STIESIA



Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diana Putri Hardianti

N.P.M : 19.1.03.02056

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul :

PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO

Adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan tugas akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat orang atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan STIESIA batal saya terima.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Diana Putri Hardianti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. MAHASISWA

Nama : Diana Putri Hardianti
Program Studi : D3 Akuntansi
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 16 Agustus 2000
Agama : Islam
Jumlah Saudara/ Anak ke : 3/2
Alamat : Bancang Gang 05 No 08
Nomor Telepon : 085748801793

B. ORANG TUA

Nama : Ganung Hardianto
Alamat : Bancang Gang 05 No 08
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat Kantor/Telepon : Jl. R.A Basuni

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD di SDN WATES 1 Mojokerto Tahun 2013
2. Tamat SLTP di SMP NEGERI 9 Mojokerto Tahun 2016
3. Tamat SLTA di SMA NEGERI 3 Mojokerto Tahun 2019
4. Pendidikan Tinggi (PT)

Nama PT	Alamat	Semester	Tahun	Keterangan
STIESIA Surabay	Jl.Menur Pumpungan No. 30 Surabaya	V1(Enam)	2022	Lulus



Dibuat dengan sebenarnya

Diana Putri Hardianti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “ **Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto**”.

Laporan Tugas Akhir ini syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Diploma Tiga Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Tujuan dibuatnya Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan program riset yang penulis inginkan.

Selama menyusun Laporan Tugas Akhir ini penulis mendapat bantuan serta dukungan dari beberapa pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan lancar.
2. Orang tua beserta keluarga besar yang selalu memberi dukungan, semangat, motivasi dan bimbingan dalam hal moral maupun mental sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

3. Ibu Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
 4. Ibu Dra. Dini Widyawati, M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Prodi D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
 5. Ibu Dr. Lilis Ardini, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menyusun laporan Tugas Akhir.
 6. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah mengajarkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
 7. Bapak Chairul Anwar S.H., M.H selaku pembimbing lapang serta staff karyawan yang telah mengarahkan penulis selama Tugas Akhir.
 8. teman-teman STIESIA Surabaya yang telah memberikan doa dan dukungan.
- Penulis menyadari dalam pembuatan laporan ini masih terdapat kekurangan yang dimiliki, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna untuk perbaikan laporan kedepannya. Semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk mahasiswa/mahasiswi STIESIA Surabaya serta pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 13 Juli 2022




Diana Putri Hardianti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR TUGAS AKHIR	i
HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Tugas Akhir	5
1.3 Manfaat Tugas Akhir.....	5
1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir.....	6
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	6
BAB 2TINJAUN PUSTAKA.....	7
2.1 Organisasi Sektor Publik.....	7
2.2 Kinerja	8
2.2.1 Pengukuran Kinerja.....	8

2.2.2	Pengukuran Kinerja.....	9
2.2.3	Tujuan Pengukuran Kinerja	9
2.2.4	Manfaat Pengukuran Kinerja	11
2.2.5	Informasi yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja.....	12
2.3	Value For Money	13
2.3.1	Manfaat Value For Money	15
2.3.2	Langkah Perencanaan dan Pengukuran Kinerja ValueFor Money	15
2.3.3	Konsep Dasar Input, Output dan Outcome	16
2.3.4	Teknik Pengukuran Value For Money.....	19
BAB 3 HASIL STUDI LAPANG DAN PEMBAHASAN.....		22
3.1	Hasil Studi Lapang.....	22
3.1.1	Gambaran Objek Studi Lapang.....	22
3.1.2	Profil Instansi	22
3.1.3	Sejarah Instansi	23
3.1.4	Visi dan Misi Instansi.....	25
3.1.5	Struktur Organisasi.....	26
3.2	Pembahasan.....	36
3.2.1	Ketenagakerjaan	36
3.2.2	Langkah-langkah Pengukuran Kinerja Value For Money	37



3.2.3 Analisis Hasil Penelitian	40
3.2.4 Klasifikasi Belanja dan Jenis Pengeluaran.....	40
3.2.5 Ukuran Efisiensi.....	42
3.2.6 Perbandingan Ukuran Efisiensi tahun 2019-2021.....	48
3.2.7 Ukuran Efektivitas.....	49
3.2.8 Perbandingan Ukuran Efektivitas tahun 2019-2021	52
3.2.9 Ukuran Ekonomis.....	53
3.2.10 Perbandingan Ukuran Ekonomis tahun 2019-2021	56
BAB 4 PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan.....	35
2. Susunan Pegawai Kantor Pertanahan	36
3. Realisasi Pengeluaran Tahun 2019.....	40
4. Realisasi Pendapatan Tahun 2019.....	41
5. Ukuran Efisiensi Tahun 2019.....	41
6. Realisasi Pengeluaran Tahun 2020.....	42
7. Realisasi Pendapatan Tahun 2020.....	43
8. Ukuran Efisiensi Tahun 2020.....	43
9. Realisasi Pengeluaran Tahun 202.....	44
10. Realisasi Pendapatan Tahun 2021.....	45
11. UkuranEfisiensi Tahun 2021.....	45
12. Perbandingan Ukuran Efisiensi Tahun 2019-2021.....	46
13. Pengukuran Tingkat Efektivitas Tahun 2019.....	47
14. Pengukuran Tingkat Efektivitas Tahun 2020.....	48
15. Pengukuran Tingkat Efektivitas Tahun 2021.....	49
16. Perbandingan Ukuran Efektivitas Tahun 2019-202.....	50
17. Pengukuran Tingkat Ekonomis Tahun 2019.....	51
18. Pengukuran Tingkat Ekonomis Tahun 2020.....	52
19. Pengukuran Tingkat Ekonomis Tahun 2021.....	53
20. Perbandingan Ukuran Efektifitas Tahun 2019-2021.....	54

Daftar Gambar

Gambar

Halaman

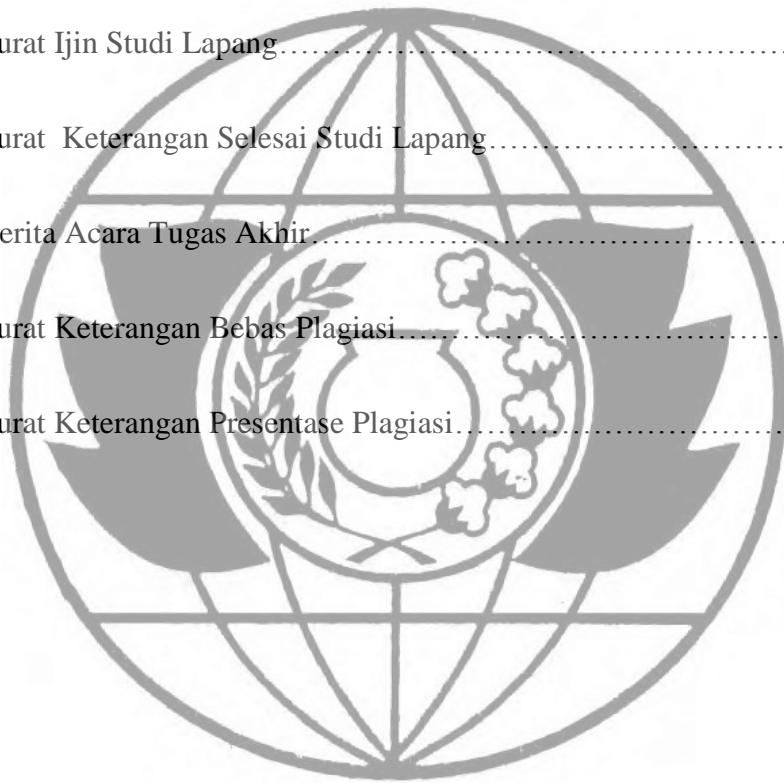
1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.....26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Penulisan Akhir.....
2. Kartu Konsultasi Penulisan Tugas Akhir.....
3. Surat Ijin Studi Lapang.....
4. Surat Keterangan Selesai Studi Lapang.....
5. Berita Acara Tugas Akhir.....
6. Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....
7. Surat Keterangan Presentase Plagiasi.....



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan. Setiap organisasi membutuhkan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mencapainya tujuan tersebut, setiap organisasi harus memiliki visi, misi, dan strategi untuk mencapainya. Salah satu cara untuk melihat apakah tujuan dan rencana telah tercapai dengan menggunakan pengukuran kinerja dalam organisasi.

Kinerja sektor publik saat ini menjadi sorotan masyarakat karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Orang sering berfikir bahwa organisasi sektor publik adalah tempat yang boros, merugi, oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran kinerja organisasi sektor publik agar publik tidak mengakui pemerintah sebagai tempat pemborosan uang.

Pengukuran kinerja berperan penting dalam mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu instansi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Mengukur keberhasilan memiliki tiga tujuan. Pertama, indikator kinerja utama dirancang untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintahan. Kedua, pengukuran sektor publik untuk alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pengukuran daya pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi

kelembagaan (Mardiasmo,2009:121). Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja sebuah organisasi agar mengetahui apakah pemerintah mempunyai kinerja yang baik atau malah sebaliknya.

Mardiasmo (2009:4) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* tidak hanya berfokus pada sisi finansial tetapi juga pada didasarkan pada konsep manajemen berdasarkan tiga faktor : Hal ini terkait dengan tingkat biaya yang dikeluarkan saat melakukan atau mengambil aktivitas, dengan mempertimbangkan input yang digunakan yaitu:

- 1.Efisiensi, mengacu pada hubungan antara barang yang diproduksi dan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk menghasilkan layanan (*output*) dan *output*, disebut efisiensi bila dapat menghasilkan *output* dengan input yang dapat menghasilkan *input* terkecil atau *output* terbesar.
2. Efektivitas, terkait dengan membandingkan hasil dan keluaran. Efektivitas sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Surve dilakukan di Kantor Pertanahan kabupaten Mojokerto.
3. Ekonomis, berkaitan dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan atau untuk memperoleh sesuatu mengingat *input* yang digunakan.

Survey dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang merupakan

salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas megurusi di bidang pertanahan dan bertanggung jawab mendukung diwilayahnya.

Peneliti menggunakan metode *Value For Money* sebagai alat pengukuran kinerja untuk Kantor Pertanahan hal ini sejalan dengan misi yaitu:

1. Menguatkan kepercayaan masyarakat dengan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Mempercepat penyelesaian perkara-perkara yang ada sekaligus meminimalisir timbulnya masalah baru.
3. Melaksanakan penataan kawasan tanpa paksaan.
4. Mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih mudah murah dan terbebas calo.
5. Memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan redistribusi tanah dan kegiatan pensertifikatan lainnya.

Peranan Kantor Pertanahan dalam mencapai misi, tujuan pengelolaan pertanahan tidak bisa diabaikan. Pengeluaran atau belanja pemerintah daerah untuk kegiatan baik penyelenggarakan pengelolaan Kantor pertanahan maupun pengabdian kepada masyarakat didanai melalui APBD dan memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Peneliti menerapkan prinsip *Value For Money* artinya ekonomis (Hemat cermat) dalam

pengalokasian sumber daya, serta selektif (berhasil guna) dalam arti mencapai sebuah tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009:130).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pengukuran kinerja menggunakan metode *Value For Money*. Berdasarkan survei sebelumnya, Anggi (2020) melaporkan bahwa hasil kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu tahun 2017-2019 terbilang efisien dan efektif. Sedangkan menurut penelitian sebelumnya, Mistina (2015) belum berhasil dalam mengelola keuangannya, menemukan bahwa hasil kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah dari tahun 2011 hingga 2013 menunjukkan skala ekonomi yang cukup baik dan efisiensi rata-rata. Itu efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, jelaslah bahwa pengukuran kinerja sangat penting dan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Bersamaan dengan itu, peneliti akan menggunakan judul **“PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO“**

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang diukur menggunakan Metode *Value For Money* dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat yang diperoleh dari studi lapang ini antara lain :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama diperkuliahan terutama yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik terutama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.
2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto
 - a. Memberikan informasi kinerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dan sekaligus sebagai evaluasi agar pelaksanaan/kegiatan kedepannya dapat terlaksana dengan lancar ekonomis, efisien dan efektif.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi mengenai alat untuk mengukur kinerja yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup studi lapangan meliputi pembahasan mengenai pengukuran kinerja yang ditentukan adalah periode tahun 2019 sampai dengan 2021, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagai sumber dengan menggunakan metode *Value For Money* sebagai alat ukur kinerja.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan pertanyaan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian (Suyoto, 2013:22). Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewancarai salah satu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yaitu kepala bidang akuntansi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber pengumpulan data dengan cara mencatat, mempelajari, dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan objek tersebut dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah berupa sumber tertulis yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 sampai dengan 2021.

BAB 2

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian suatu negara yang bertujuan melayani kepentingan umum guna mewujudkan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik merupakan tujuan utama organisasi sektor publik Mulyani *et al* (2017:2). Oleh karena itu, akuntabilitas dalam organisasi sektor publik merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi sektor publik.

Menurut Mahsun, organisasi sektor publik adalah organisasi kepentingan publik yang umumnya menyediakan barang dan jasa yang dibayar melalui pajak dan pendapatan lainnya (Widjanarko, 2018:3). Di sisi lain, menurut Biduri (2018), organisasi sektor publik adalah mereka yang melakukan transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi tidak seperti perusahaan lain, terutama yang mencari keuntungan dengan sumber daya ekonomi. Organisasi sektor publik beroperasi dengan tujuan tidak mengejar keuntungan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi masyarakat yang didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa dan umumnya memberikan pelayanan publik yang dibayar dengan

pajak atau pendapatan lain. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara profit maupun non profit.

2.2 Kinerja

2.2.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono, 2012:95). Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Rivai, 2013:604). Kinerja sebagai gambaran pencapaian suatu kegiatan/organisasi/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi (Indra Bastian,2006:274).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang telah dihasilkan oleh seorang untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi maupun publik.

2.2.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (*Performance measure*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi (Moeheriono, 2012:96).

Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012:72), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan pengukuran kinerja merupakan sebuah proses melakukan penilaian terhadap kemajuan pekerjaan yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi.

2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Sujarweni (2015:47), tujuan pengukuran kinerja adalah :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga

3. Dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
4. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai keselarasan antara tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai.
5. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan menurut Mahmudi (yang dikutip dalam Widjanarko,2018 tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat ketercapain tujuan.
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
3. Memperbaiki kinerja pegawai.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan.
5. Memotivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas pegawai.

Pengukuran kinerja dilakukan setiap organisasi sebagai evaluasi dan kemudian dijadikan sebagai perbaikan untuk periode selanjutnya menjadikan lebih baik.

2.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja menurut (Mardiasmo,2009:60), yang dikutip oleh Widjanarko (2018) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memasstikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

2.2.5 informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja

berikut beberapa informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja :

1. Informasi finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan anggaran yang dibuat. Penelitian dilakukan dengan menganalisis selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan anggaran yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada :

- a. Varians pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan sebuah aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran.
- b. Varians pengeluaran
 - 1) Varians belanja rutin
Varians belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat terus menerus.
 - 2) Varians belanja investasi
Varians belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya biasanya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan pemerintah.

2. Informasi Non Finansial

Informasi non finansial juga dapat digunakan sebagai alat ukur lainnya. Informasi finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses manajemen.

Teknik pengukuran kinerja yang sering dikembangkan oleh berbagai organisasi besar adalah *Balance Scorecard*. BSC dinilai cocok digunakan untuk organisasi sektor publik karena *Balance Scorecard* tidak hanya mengukur berdasarkan aspek finansial saja, akan tetapi juga aspek non finansial. Berikut adalah 4 aspek yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan *Balance Scorecard*, yaitu :

- a. Perspektif finansial.
- b. Perspektif kepuasan pelanggan.
- c. Perspektif efisien proses internal.
- d. Prespektif pembelajaran dan pertumbuhan.

2.3 Value For Money

Organisasi sektor publik dituntut untuk selalu melaksanakan program atau kegiatan dengan baik dengan memanfaatkan anggaran yang telah dianggarkan sebeumnya. Apabila penggunaan suatu anggaran terlalu rendah maka organisasi sektor publik dianggap tidak dapat memanfaatkan dana yang dianggarkan dengan baik, namun apabila penggunaan suatu anggaran terlalu besar maka organisasi sektor publik tersebut dianggap sebagai pemborosan. Oleh karena itu munculah suatu tuntutan untuk melakukan pengukuran menggunakan metode *Value For Money* dalam menjalankan program atau kegiatan. *Value For Money* merupakan suatu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang pengukurannya berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efesiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2015:83)

a. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi sektor publik dalam menghasilkan output maksimal dengan menggunakan atau memanfaatkan *input* serendah-rendahnya efisiensi merupakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan dan dinyatakan dalam satuan moneter.

b. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, organisasi program, kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

c. Ekonomis

Ekonomis adalah kemampuan suatu organisasi sektor publik dalam menghasilkan *output* maksimal dengan menggunakan atau memanfaatkan *input* serendah-rendahnya dengan *input* yang diperoleh dengan anggaran untuk memperoleh input tersebut. Ekonomis berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi dalam menghindari pemborosan dalam memanfaatkan anggaran belanja dalam sebuah kegiatan.

2.3.1 Manfaat *Value For Money*

Manfaat konsep *Value For Money* pada organisasi sektor public (Mardiasmo, 2009:7) antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai ukuran pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.3.2 Langkah Perencanaan dan Pengukuran Kinerja *Value For Money*

Menurut (Mahmudi, 2015:95) manajemen kinerja terintegrasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja terdiri atas empat tahap, antara lain :

1. Penentuan visi, misi dan tujuan serta strategi.
2. Penerjemahan visi, misi dan tujuan, serta strategi ke dalam
 - a. Sasaran strategik.
 - b. Inisiatif strategik.
 - c. Indikator kinerja (*input, output, outcome, benefit, impact*)
 - d. Target kinerja

3. Penyusunan program.

4. Penyusunan anggaran

Sementara itu dalam pengukuran kinerja *Value For Money* dibangun atas tiga komponen utama, antara lain :

1. Komponen visi misi, tujuan, sasaran dan target.
2. Komponen *input*, *output*, proses dan *outcome*.
3. Komponen pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

2.3.3 Konsep Dasar Input, Output dan Outcome

Value For Money adalah pengukuran kinerja yang mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam suatu kegiatan, program dan organisasi (Mahmudi, 2015:83). Sebelum melakukan pengukuran tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas, organisasi pemerintah harus dapat mengetahui konsep *input*, *output*, dan *outcome* menurut (bastian, 2001:337) :

1. *Input*

Input atau masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). *Input* mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

2. *Output*

Output atau keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ non fisik. *Output* dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terstruktur.

3. *Outcome*

Outcome atau hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Berikut ini cara mengenai pengukuran *input*, *output*, *outcome* yang dijelaskan oleh (Mahmudi, 2015:98) adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran *Input*

Pengukuran *input* adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan *output*. Proses tersebut dapat berbentuk program atau aktivitas. Pengukuran *input* dilakukan dengan cara membandingkan input sekunder dengan *input* primer. Dengan kata lain pengukuran input adalah untuk mengetahui harga per unit input. Dalam hal ini *input* yang digunakan adalah finansial berupa anggaran yang diperlukan untuk mengukur tingkat ekonomis.

2. Pengukuran *Output*

Pengukuran *ouput* adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran *ouput* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Pengukuran *ouput* berbentuk *output* yang bersifat kuantitatif. Keuangan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh Kantor Pertanahan kabupaten Mojokerto. *Output* juga bersifat nonkuantitatif keuangan yang dinyatakan dalam unit fisik.

3. Pengukuran *Outcome*

Pengukuran *outcome* adalah untuk mengukur nilai dari suatu aktivitas atau program. Dengan demikian pengukuran *outcome* adalah pengukuran dampak sosial atau aktivitas. Pengukuran *outcome* tidak dapat dilakukan sebelum hasil yang diharapkan dari suatu program atau aktivitas ditetapkan, karena pengukuran *outcome* berupa perbandingan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan.

2.3.4 Teknik Pengukuran *Value For Money*

1. Pengukuran Tingkat Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara *ouput* dan *input*. Semakin besar *ouput* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah :

- a. Meningkatkan *ouput* pada tingkat *input* yang sama.
- b. Meningkatkan *ouput* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*
- c. Menurunkan *input* pada tingkat *ouput* yang sama.
- d. Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi

penurunan output.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran} \times 100\%}{\text{Realisasi pendapatan}}$$

Keterangan :

Jika < 10% berarti sangat efisiensi

Jika 10% s.d 20% berarti efisiensi

Jika 21% s.d 30 % berarti cukup efisiensi

Jika 31% s.d 40% kurang efisiensi

Jika > 40% tidak efisiensi

2. Pengukuran Tingkat Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan dalam mencapai tujuan tersebut.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan} \times 100\%}{\text{Anggaran Pendapatan}}$$

Keterangan :

Jika > 100% berarti sangat efektif

Jika 100% berarti cukup efektif

Jika 90% s.d 99% berarti cukup efektif

Jika < 75% berarti tidak efektif

3. Pengukuran Tingkat Ekonomis

Menurut Mahmudi (2015:83), ekonomis terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang atau kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi.

Rumus yang digunakan dalam pengukuran tingkat ekonomis yaitu :

$$\text{Tingkat ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran} \times 100\%}{\text{Anggaran pengeluaran}}$$

Keterangan :

Jika > 100% berarti ekonomis

Jika 85 s.d 100% berarti cukup ekonomis

Jika 65 s.d 84% berarti kurang ekonomis

Jika < 65% berarti tidak ekonomis

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Studi Lapang

3.1.1 Gambaran Objek Studi Lapangan

Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang bertempat di Jalan Pahlawan No.45 Gatul Banjaragung Kecamatan. Puri, Mojokerto. Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Mempunyai tujuan penataan kawasan tanpa paksaan dan untuk memajukan masyarakat lebih sejahtera.

3.1.2 Profil Instansi

Nama Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Alamat : JL Pahlawan NO.45, Gatul Banjaragung. Kecamatan Puri

Nomor Telepon : 0321-396234

Nomor Fax : 0321-396821

3.1.3 Sejarah Instansi

Pada era 1960 sejak berlakunya undang-undang pokok agraria (UUPA) Kantor Pertanahan mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. Tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. Ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan di proses dan ditindak lanjuti dari struktur pimpinan pusat sampai pada tingkat kantah, namun ketika dalam naungan departemen dalam negeri hanya melalui dirjen agraria sampai ketinggian kantah. Disamping itu secara kelembagaan badan pertanahan nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek. Untuk mengetahui perubahan tersebut di bawah ini adalah sejarah kelembagaann Badan Pertanahan Nasional :

- (1960)

Pada awalnya berlakunya UUPA semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk peraturan pemerintah masih dikeluarkan oleh presiden dan menteri muda kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi.

- (1965)

Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R.Hermanses. S.H.

- (1968)

Pada tahun 1968 secara kelembagaan perubahan. Pada saat itu dimasukkan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jenderal agraria.

- (1988-1990)

Pada periode ini kembali mengalami perubahan. Lembaga yang menangani urusan agraria dipisah dari departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen.

- (1990)

Pada periode ini kembali mengalami perubahan menjadi menteri negara agraria/badan pertanahan nasional yang masih dipimpin oleh Ir.Soni Harsono.

- (1998)

Pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama menteri negara agraria/badan pertanahan nasional. Perubahan yang terjadi hanya pada pucuk pimpinan saja.

- (2002-2006)

Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang terjadi sangat penting. Pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga negara. Kedudukannya sejajar dengan kementerian.

- (2006-2012)

Pada tahun 2006 sampai 2012 BPN RI dipimpin oleh Joyo Winoto dengan 11 agenda kebijakannya dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya.

- (2012-2014)

Pada tanggal 14 juni 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai kepala BPN RI menggantikan Joyo Winoto.

- (2014- Sekarang)

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat kementerian baru bernama kementerian agraria dan tata ruang indonesia, sehingga sejak 27 oktober 2014 BPN berada dibawah naungan menteri agraria dan tata ruang.

3.1.4 Visi dan Misi Instansi

Sebuah instansi tentunya mempunyai sebuah visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Berikut adalah visi dan misi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto :

- a. Visi

Menjadi kantor yang mampu mengantarkan masyarakat lebih sejahtera dengan tanahnya.

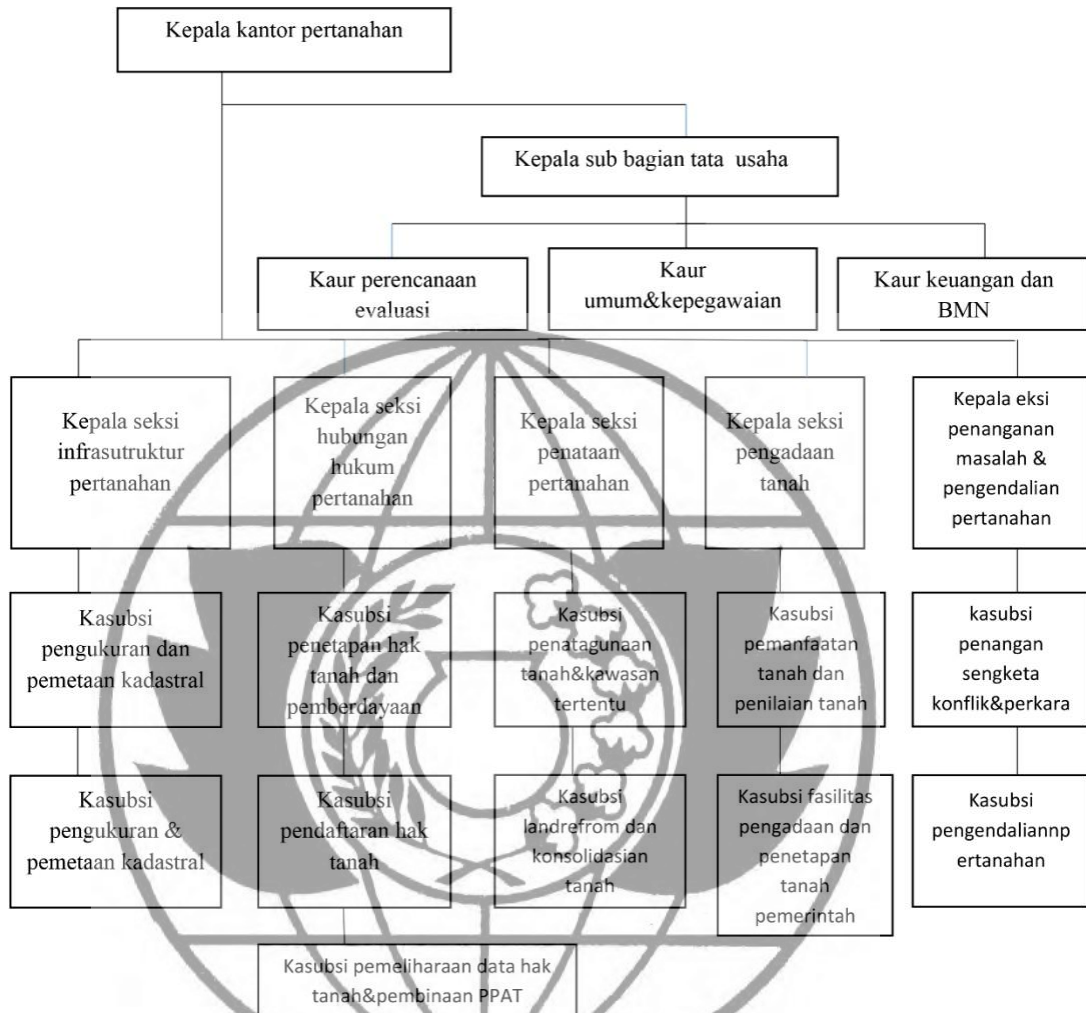
b. Misi

1. Memperkuat kepercayaan masyarakat dengan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Mempercepat penyelesaian perkara-perkara yang ada sekaligus meminimalisir timbulnya masalah baru.
3. Melaksanakan penataan kawasan tanpa paksaan.
4. Mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih mudah dan terbebas calo.
5. Memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan redistribusi tanah dan kegiatan pensertipikatan lainnya.

3.1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan antara tiap bagian yang saling berhubungan antara tiap bagian saling berhubungan yang dimana menjelaskan posisi yang lebih tinggi sampai dengan posisi yang lebih rendah secara hierarki. Struktur yang ada pada suatu organisasi berguna untuk mengetahui dalam menjalankan kegiatan operasional agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi juga dapat disebut sebagai kerangka yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Biasanya dalam struktur organisasi terdapat dua jenis garis yaitu garis lurus dan garis putus-putus. Garis pada bagan organisasi menandakan hubungan satu jabatan dengan jabatan atau bagian lain. Garis lurus menandakan garis yang menghubungkan satu jabatan yang posisinya lebih tinggi dengan jabatan yang lebih rendah.

Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di dalam Badan Pertanahan



Nasional Kabupaten Mojokerto :

Gambar 1

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Sumber : Intern Perusahaan

Setiap perusahaan pada umumnya memiliki struktur organisasi yang menggambarkan kerangka dan susunan hubungan antara fungsi, bagian, dan posisi selain itu pembuatan struktur perusahaan sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Berikut ini adalah penjabaran mengenai tugas dan wewenang masing-masing jabatan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yaitu :

a. Kepala Kantor Pertanahan

Didalam kantor Pertanahan kepala kantor pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, anggaran dan pelaporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program strategis dan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan di kantor wilayah dan kantor pertanahan.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugasnya: Memberikan pelayanan administrative kepada seluruh satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang-undangan.

Fungsinya:

1. Pengolahan data dan informasi.
2. Penyusunan rencana program, dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
4. Pelaksanaan urusan keuangan dan kepegawaian.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasaran.

c. Sub Bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Tugasnya: Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertipan bekas tanah hak; pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan pejabat pembuat akte tanah (PPAT).

Fungsinya:

1. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah.
2. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta , melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengolahan.
3. Penyiapan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak.

Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari

1. Subseksi Penetapan Hak Tanah

Tugasnya: Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, perpanjang jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; penetapan dan atau rekomendasi perpanjang

jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan pendaftaran hak tanah perorangan.

2. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Tugasnya: Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, dan hak pengolahan bagi instansi pemerintahan, badan hukum pemerintahan, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan.

3. Subseksi Pendaftaran Hak

Tugasnya: Menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah; pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelola, tanah wakaf, data lainnya, data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.

4. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah Tugasnya: Menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan, dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian dibidang pendaftaran tanah.

d. Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah

Tugasnya: Menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform,

konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau- pulau kecil perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Fungsinya:

1. Penyusunan daerah berkas konflik, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota.
2. Pemelihara basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota.
3. Pengusulan penetapan/pengelasan tanah.
4. Penyediaan tanah untuk pembangunan.
5. Pengelohan sumbangan tanah untuk pembangunan.

Pengaturan dan Penataan tanah terdiri dari :

a. Sub bagian penatagunaan tanah dari kawasan tertentu

Tugasnya: Menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah rencana penataan, kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan penertiban penimbangan teknis, penanguhan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuain penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual.

b. Subseksi *Landreform* dan Konsolidasi Tanah

Tugasnya: Menyiapkan bahan usul penetapan/penegasan tanah menjadi obyek *landreform*, penguasaan tanah obyek *landreform*, pemberian ijin peralihan atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari *landreform*, monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugi, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi *landreform* serta fasilitas bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran, usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflikserta permukiman kembali penyediaan tanah dan pengelola sumbangan tanah untuk pembangaunan teknik dan metode, promosi dan sosialisasi, pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat, kerjasama dan fasilitas, pengolahan basis data dan informasi monitoring dan evaluasi koordinasi dan pelaksanaan konsolidasi tanah.

c. Seksi pengendalian dan pemberdayaan

Tugasnya: Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengolahan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.

Fungsinya :

1. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi,

program pertanahan dan sektor dalam pengolahan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan kritis.

2. Peningkatan partisipasi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan akses berproduktif.
3. Pemanfaatan tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan.
4. Pengolahan basis data dan hak atas tanah, tanah Negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
5. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar.

d. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Terdiri dari

Subseksi Pengendalian Pertanahan

Tugasnya: Menyiapkan pengolahan basis data, melakukan inventarisasi dan, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan program pertanahan dan sektor dalam pengolahan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.

e. Subseksi Pengendalian Pertanahan

Tugasnya: Menyiapkan pengolahan basis data, melakukan inventarisasi dan, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan

serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan program pertanahan dan sector dalam pengolahan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.

f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Tugasnya: Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, perkara pertanahan.

Fungsinya:

1. pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
2. penyiapan bahan dan penggunaan sengketa dan konflik pertanahan serta hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif, penyelesaian melalui mediasi, fasilitas dan sebagainya usulan dan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antar orang dan badan hukum dengan tanah.
3. pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

g. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara terdiri dari

1. Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara terdiri dari

Tugasnya: Menyiapkan pengkajian hukum sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan,

usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian Sengketa melalui mediasi, fasilitas, koordinasi penanganan sengketa dan konflik.

2. Subseksi Perkara Pertanahan

Tugasnya: Menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian antar orang dan badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Ketenagakerjaan

Dalam melaksanakan tugas serta jabatannya baik menurut manajemen ataupun operasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto membutuhkan adanya bantuan sumber data manusia serta sarana infrastruktur yang dipunya, mengenai sumber daya tersebut ialah:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personil yang dipunya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam mendukung kelajuan realisasi kewajiban-kewajiban dinas adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	PNS	49	40,16%
2	HONORER	73	59,84%
JUMLAH		122	100%

*Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Jumlah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Terdiri dari 122 pegawai yang terdiri dari 49 orang atau 40,16% PNS, 73 orang atau 59,84% Honorer.

Tabel 2
Susunan pegawai Kantor Pertanahan
Berasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
		PNS
1	GOLONGAN IV	8
2	GOLONGAN III	33
3	GOLONGAN II	8
4	GOLONGAN 1	0
JUMLAH		49

*Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Menurut jumlah pangkat dan golongan, Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto mempunyai kapasitas SDM yang cukup memadai yaitu dari 49 PNS, yang menduduki pangkat golongan IV sejumlah 8 orang, golongan III sejumlah 33 orang, golongan II sejumlah 8 orang.

3.2.2 Langkah-langkah Pengukuran kinerja *Value For Money* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Dalam rancangan mewujudkan *good government* dan *clear government* maka diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah secara konstan dan optimal melakukan kewajiban utama, peran serta kinerja. Dengan hal ini diharapkan aktualisasi pemerintahan makin berhasil guna, dan berdaya guna bersih, tanggung jawab searah dengan maksud yang akan diraih serta sebagai wujud usaha transparansi finansial terhadap masyarakat. Untuk melaksanakan hal itu, Kantor Pertanahan menetapkan VISI yakni “Menjadi kantor yang mampu mengantarkan masyarakat lebih sejahtera dengan tanahnya”. Visi Kantor Pertanahan tersebut dituangkan ke dalam 5 misi yakni:

1. Memperkuat kepercayaan masyarakat dengan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan
2. Mempercepat penyelesaian perkara-perkara yang ada sekaligus meminimalisir timbulnya masalah baru.
3. Melaksanakan penataan kawasan tanpa paksaan
4. Mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih mudah murah dan terbebas calo.
5. Memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan redistribusi tanah dan

kegiatan pensertipikatan lainnya. Adapun tujuan dari misi ke-5 tersebut adalah **“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan ekonomis guna mewujudkan Kantor Pertanahan Berintegritas”**.

Agar tujuan dan sasaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan strategi dan kebijakan operasional sesuai dengan ketentuan atau regulasi oleh pihak yang berkuasa untuk dibuat dasar, patokan ataupun arah dalam pembangunan, aktualisasi program aktivitas bagi teraihnya keselarasan serta keharmonisan dalam pelaksanaan sasaran maksud, pada lingkungan internal Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

Value For Money adalah konsep manajemen organisasi sektor publik yang melandaskan pada tiga bagian penting, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas (Mardiasmo, 2019:98).

1. Efisiensi adalah pencapaian keluaran (*output*) yang maksimal dengan masukan tertentu ataupun penggunaan masukan terendah untuk memperoleh keluaran tertentu. Dengan rumus realisasi pengeluaran dibagi realisasi pendapatan bagi 100%. Efisiensi adalah membandingkan keluaran/masukan (*output/input*) yang berhubungan dengan standar kinerja atau target yang sudah ditentukan.
2. Efektivitas adalah tingkat perolehan hasil program dengan target yang ditentukan. secara sederhana efektifitas ialah membandingkan *outcome* dengan *output*. Dengan rumus realisasi pendapatan dibagi anggaran pendapatan dikali 100%.

3. Ekonomis adalah perolehan masukan (*input*) dengan mutu dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomis adalah membandingkan antara masukan yang berlangsung dengan nilai masukan yang semestinya. Dengan rumus realisasi pengeluaran dibagi anggaran pengeluaran lalu dikalikan dengan 100%. Ekonomis berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik bisa meminimalisir sumber daya yang dimanfaatkan, dengan mencegah pengeluaran yang boros dan tidak berguna.

3.2.3 Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian ini akan membahas pengukuran kinerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto memakai metode *Value For Money* ialah pengukuran kinerja yang meliputi efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

3.2.4 Klasifikasi Belanja dan Jenis Pengeluaran

Berikut belanja penyelenggaraan dan jenis pengeluaran (Syaiful,2006:1-5).

1. Belanja Pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri dan pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah Contoh : belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja uang makan PNS, belanja tunjangan PNS.

2. Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis dipakai untuk

memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Contoh : belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan makanan, belanja sewa gedung, belanja bahan.

3. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan pemerintah.

Contoh : belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal lainnya.

3.2.5 Ukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat input terhadap tingkat output dari organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi membutuhkan data realisasi biaya untuk menerima pendapatan serta data realisasi pendapatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Pengukuran efisiensi dalam laporan realisasi anggaran berikut merupakan pengukuran dari tahun 2019-2021.

Tabel 3
Realisasi Pengeluaran Tahun 2019
Dalam Ribuan

Pos Pengeluaran	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	4.067.031.000	3.841.947.975	225.083.025	94.47 %
Belanja Barang	21.521.944.000	19.769.129.573	1.250.236.427	94.05%
Belanja Modal	200.000.000	198.714.000	1.286.000	99.36%
Jumlah	25.286.397.000	23.809.795.382	1.476.605.452	94.16%

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Tahun 2019*

Pada tabel 3 perhitungan realisasi pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2019 diperoleh total sebesar Rp23.809.791.548.

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Tahun 2019
Dalam Ribuan

Pos Pendapatan	Anggaran	Realisasi	% Tingkat Efesiensi
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	43.599.000	100%
Pendapatan Lain-lain	0.00	642.042.372	100%
Total	0.00	685.641.372	100%

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2019*

Data realisasi pendapatan pada tahun 2019 pada tabel 4 terdiri 2 pos yaitu pendapatan penerimaan negara bukan pajak, pendapatan lain-lain. Dari pendapatan tersebut diperoleh total realisasi pendapatan sebesar Rp685.641.372.

Tabel 5
Ukuran Efisiensi Tahun 2019
Dalam Ribuan

Keterangan	Realisasi (Rp)	Keterangan
Total Pengeluaran	23.809.791.548	-
Total Pendapatan	685.641.372	-
Total	3.5%	Sangat Efisien

*Sumber : Data Diolah

Pada tabel 5 di atas hasil kalkulasi untuk ukuran efisiensi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2019, dengan melakukan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan pendapatan diperoleh 3.5% yang berarti sangat efisiensi karena kurang dari 10%.

Tabel 6
Realisasi Pengeluaran Tahun 2020
Dalam Ribuan

Pos Pengeluaran	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	3.631.570.000	3.195.317.201	436.253.152	87.99 %
Belanja Barang	16.989.826.000	14.879.900.684	2.109.925.316	87.58%
Belanja Modal	16.578.000	16.578.000	0	100%
Jumlah	20.637.974.000	18.091.795.885	2.546.178.468	87.66%

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Tahun 2020

Pada tabel 6 perhitungan realisasi pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 diperoleh total sebesar Rp18.091.795.532.

Tabel 7

Realisasi Pendapatan Tahun 2020

Dalam Ribuan

Pos Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Tingkat Efektivitas
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	268	100%
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Total	0.00	268	100%

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2020*

Data realisasi pendapatan pada tahun 2020 pada tabel 7 terdiri 1 pos yaitu pendapatan penerimaan negara bukan pajak, pendapatan lain-lain. Dari pendapatan tersebut diperoleh total realisasi pendapatan sebesar Rp268.

Tabel 8

Ukuran Efisiensi Tahun 2020

Dalam Ribuan

Keterangan	Realisasi (Rp)	Keterangan
Total Pengeluaran	18.091.795.532	-
Total Pendapatan	268	-
Total	6%	Sangat Efisien

**Sumber : Data Diolah*

pada tabel 8 di atas hasil kalkulasi untuk ukuran efisiensi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2020, dengan melakukan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan pendapatan diperoleh 6% yang berarti sangat efisiensi karena kurang dari 10%.

Tabel 9
Realisasi Pengeluaran Tahun 2021

Dalam Ribuan

Pos Pengeluaran	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	3.192.036.000	3.160.580.338	31.455.766	99.01%
Belanja Barang	17.613.996.000	16.905.965.715	708.030.285	95.98%
Belanja Modal	327.852.000	317.502.000	10.350.000	96.84%
Jumlah	21.133.884.000	20.384.048.053	749.836.051	96.45%

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Tahun 2021*

Pada tabel 9 perhitungan realisasi pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 diperoleh total sebesar Rp20.384.047.949.

Tabel 10
Realisasi Pendapatan Tahun 2021
Dalam Ribuan

Pos Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Tingkat Efektivitas	Keterangan
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	1.190.700	100%	Efektif
Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-
Total	0.00	1.190.700	100%	Efektif

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2021*

Data realisasi pendapatan pada tahun 2021 pada tabel 10 terdiri 1 pos yaitu pendapatan penerimaan negara bukan pajak, pendapatan lain-lain. Dari pendapatan tersebut diperoleh total realisasi pendapatan sebesar Rp1.190.700.

Tabel 11
Ukuran Efisiensi Tahun 2021
Dalam Ribuan

Keterangan	Realisasi (Rp)	Keterangan
Total Pengeluaran	20.384.047.949	-
Total Pendapatan	1.190.700	-
Total	1.7%	Sangat Efisien

**Sumber : Data Diolah*

Pada tabel 11 di atas hasil kalkulasi untuk ukuran efisiensi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2021, dengan melakukan perbandingan

antara realisasi pengeluaran dan pendapatan diperoleh 1.7% yang berarti sangat efisiensi karena kurang dari 10%.

3.2.6 Perbandingan Ukuran Efisiensi Tahun 2019-2021

Setelah mengetahui hasil perhitungan ukuran efisiensi pada tahun 2019-2021, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu membandingkan besarnya ukuran efisiensi setiap tahunnya untuk mengetahui kecenderungan efisiensi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2021. Dan berikut adalah data keseluruhan ukuran efisiensi tahun 2019-2021 :

Tabel 12
Perbandingan Ukuran Efisiensi Tahun 2019-2021
Dalam Ribuan

Tahun	Total Pengeluaran (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	%Realisasi Anggaran	Keterangan
2019	23.809.791.548	685.641.372	3.5%	Sangat Efisiensi
2020	18.091.795.532	268	6%	Sangat Efisiensi
2021	20.384.047.949	1.190.700	1.7%	Sangat Efisiensi
Rata-rata			10%	Cukup Efisiensi

*Sumber : Data Diolah

Hasil perbandingan ukuran ekonomis dari tahun 2019-2021 pada tabel 12 diperoleh rata-rata sebesar 10% menunjukkan nilai yang bersifat cukup efisiensi karena memiliki persentase tepat 10%.

3.2.7 Ukuran Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat input terhadap target-target penerimaan dari organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas membutuhkan data realisasi penerimaan dan perkiraan pendapatan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Pengukuran efektivitas dalam laporan realisasi anggaran berikut merupakan pengukuran dari tahun 2019-2021.

Tabel 13
Pengukuran Tingkat Efektifitas Tahun 2019
Dalam Ribuan

Pos Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Tingkat Efektivitas	Keterangan
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	43.599.000	100%	Efektif
Pendapatan Lain-lain	0.00	642.042.372	100%	Efektif
Total	0.00	685.641.372	100%	Efektif

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan tahun 2019*

Pada tabel 13 hasil perhitungan data untuk membandingkan total realisasi pendapatan dengan total anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2019 diperoleh hasil 100% yang berarti efektif.

Tabel 14
Pengukuran Tingkat Efektifitas Tahun 2020
Dalam Ribuan

Pos Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Tingkat Efektivitas	Keterangan
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	268	100%	Efektif
Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-
Total	0.00	268	100%	Efektif

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan tahun 2020*

Pada tabel 14 hasil perhitungan data untuk membandingkan total realisasi pendapatan dengan total anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 diperoleh hasil 100% yang berarti efektif.

Tabel 15
Pengukuran Tingkat Efektifitas Tahun 2021
Dalam Ribuan

Pos Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Tingkat Efektivitas	Keterangan
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	1.190.700	100%	Efektif
Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-
Total	0.00	1.190.700	100%	Efektif

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan tahun 2021*

Pada tabel 15 hasil perhitungan data untuk membandingkan total realisasi pendapatan dengan total anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 diperoleh hasil 100% yang berarti efektif.

3.2.8 Perbandingan Ukuran Efektifitas Tahun 2019-2021

Setelah mengetahui hasil dari perhitungan ukuran efektifitas pada tahun 2019-2021, selanjutnya yaitu membandingkan besarnya ukuran efektifitas Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2021 apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya berikut adalah data keseluruhan efektifitas tahun 2019-2021.

Tabel 16
Perbandingan Ukuran Efektifitas 2019-2021
Dalam Ribuan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Tingkat Efektifitas	Keterangan
2019	0.00	685.641.000	100%	Efektif
2020	0.00	268	100%	Efektif
2021	0.00	1.190.700	100%	Efektif
Rata-rata			100%	Efektif

**Sumber : Data Diolah*

Dari hasil tabel 16 perbandingan ukuran efektifitas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2021 diperoleh rata-rata sebesar 100% yang berarti memiliki nilai efektif.

3.2.9 Ukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keekonomisan dari pengeluaran-pengeluaran yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Pengukuran tingkat ekonomis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto membutuhkan data anggaran pengeluaran serta realisasinya. Untuk bertambah jelasnya dapat diamati pada tabel dibawah.

Tabel 17
Pengukuran Tingkat Ekonomis Tahun 2019
Dalam Rupiah

Pos Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tingkat ekonomi	Keterangan
Belanja Pegawai	4.067.031.000	3.841.947.975	94.47%	Cukup Ekonomis
Belanja Barang	21.019.366.000	19.769.129.573	94.05%	Cukup Ekonomis
Belanja Modal	200.000.000	198.714.000	99.36%	Cukup Ekonomis
Jumlah	25.286.397.000	23.809.791.548	94.16%	Cukup Ekonomis

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Tahun 2019

Pada tabel 17 bisa dilihat bahwa tingkat ekonomis Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2019 adalah 94.16%, yang artinya pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto bersifat kurang ekonomis. Hal ini disebabkan pada pos belanja pegawai yang berpengaruh besar terhadap jumlah pengeluaran. Pengeluarannya sebesar Rp3.841.947.975 padahal dana yang dianggarkan sebesar Rp4.067.031.000.

Dan pada pos belanja barang, mengalami pengeluaran sebesar Rp19.769.129.573, padahal dana yang dianggarkan sebesar Rp21.019.366.000 .

Yang artinya input yang dikeluarkan lebih kecil dari target yang dihendaki.

Tabel 18
Pengukuran Tingkat Ekonomis Tahun 2020
Dalam Rupiah

Pos Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tingkat ekonomi	Keterangan
Belanja Pegawai	3.631.570.000	3.195.316.848	87.99%	Cukup Ekonomis
Belanja Barang	16.989.826.000	14.879.900.684	87.58.%	Cukup Ekonomis
Belanja Modal	16.578.000	16.578.000	100%	Cukup Ekonomis
Jumlah	20.637.974.000	18.091.795.532	87.60%	Cukup Ekonomis

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Tahun 2020*

Pada tabel 18 bisa dilihat bahwa tingkat ekonomis Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 adalah 87.60%, yang artinya pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto bersifat kurang ekonomis. Hal ini disebabkan pada pos belanja pegawai yang berpengaruh besar terhadap jumlah pengeluaran. Pengeluarannya sebesar Rp3.195.316.848 padahal dana yang dianggarkan sebesar Rp3.631.570.000.

Dan pada pos belanja barang, mengalami pengeluaran sebesar Rp14.879.900.684, padahal dana yang dianggarkan sebesar Rp16.989.826.000. Yang artinya input yang dikeluarkan lebih kecil dari target yang dihendaki.

Tabel 19
Pengukuran Tingkat Ekonomis Tahun 2021
Dalam Rupiah

Pos Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% tingkat ekonomi	Keterangan
Belanja Pegawai	3.192.036.000	3.160.580.234	99.10%	Cukup Ekonomis
Belanja Barang	17.613.996.000	16.905.965.715	95.98%	Cukup Ekonomis
Belanja Modal	327.852.000	317.502.000	96.84%	Cukup Ekonomis
Jumlah	21.133.884.000	20.384.047.949	96.45%	Cukup Ekonomis

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Pertanahan Tahun 2021*

Pada tabel 19 bisa dilihat bahwa tingkat ekonomis Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah 96.45%, yang artinya pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto bersifat kurang ekonomis. Hal ini disebabkan pada pos belanja barang yang berpengaruh besar terhadap jumlah pengeluaran. Pengeluarannya sebesar Rp 16.905.965.715 padahal dana yang dianggarkan sebesar Rp 17.613.996.000. Yang artinya input yang dikeluarkan lebih kecil dari target yang dihendaki.

3.2.10 Perbandingan Ukuran Ekonomis Tahun 2019-2021

Setelah mengetahui hasil perhitungan ukuran ekonomis pada tahun 2019-2021, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu membandingkan besarnya ukuran ekonomi setiap tahunnya untuk mengetahui kinerja ekonomis Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2021. Dan berikut adalah data keseluruhan ukuran ekonomis tahun 2019-2021:

Tabel 20
Perbandingan Ukuran Ekonomis Tahun 2019-2021
Dalam Ribuan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tingkatan Ekonomi	Keterangan
2019	25.286.397.000	23.809.791.548	94.16%	Kurang Ekonomis
2020	20.637.974.000	18.091.795.532	87.66%	Kurang Ekonomis
2021	21.133.884.000	20.384.047.949	96.45%	Kurang Ekonomis
Rata-rata			92.09%	Kurang Ekonomis

**Sumber : Data Diolah*

Hasil perbandingan ukuran ekonomis dari tahun 2019-2021 pada tabel 20 diperoleh rata-rata sebesar 92.09% menunjukkan nilai yang bersifat kurang ekonomis karena memiliki persentase kurang dari 100%.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode *Value For Money* masih belum sesuai. Dikarenakan dari tahun 2019-2021 masih belum berhasil mengelola keuangan. Namun dalam mengukur tingkat efisiensi, tingkat efektivitas dan tingkat ekonomis telah sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode *Value For Money*. Dari tahun 2019-2021 tingkat efisiensi sudah berhasil mengelola sumber daya secara cukup maksimal dan (efisien), dengan tingkat efisien paling tinggi pada tahun 2021, dari tahun 2019-2021 tingkat efektifitas sudah berhasil juga dalam pencapaian tujuan yang diharapkan yakni (sangat efektivitas) dan tahun 2019-2021 tingkat ekonomis bisa dikatakan kurang ekonomis karena ada pemborosan dana atau pengeluaran yang tidak berguna.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dan saran yang dapat diberikan untuk Kantor Pertanahan yaitu :

Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019-2021 dikatakan masih kurang ekonomis, maka diharapkan dapat meningkatkan mutu dari setiap program kegiatan dan kinerja dalam mengelola keuangan untuk tahun-tahun

selanjutnya. Namun, kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019-2021 dikatakan sudah efisien dan sangat efektif maka diharapkan tetap menjaga mutu dari setiap program kegiatan dan kinerjanya dapat dipertahankan atau ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang.




DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Anwar. Prabu Mankunegara.2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*.Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Ardini.L,Silfyana dan Ikhsan. 2021. Melihat Prespektif Kinerja dengan *Value For Money*, *Jurnal Riset dan Manajemen (JRAAM)* 5(2) : 163-165.
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Erlangga.
- Harsono, Boedi. 2008 . *Hukum Agraria Indonesia sejarah pembentukan UUPA*, Isidan Pelaksanaanya, Djembatan, Jakarta, 2005.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE.
- Kantor Pertanahan (BPN). 2018. Gambaran Umum. <http://atrbpn.go.id>.
- Kantor Pertanahan. 2018. Visi dan Misi. <https://www.atrbpn.go.id/?menu=Visimisi>.
- Kantor Pertanahan (BPN). 2016. Struktur Organisasi BPN Kabupaten Mojokerto. https://simpeg.atrbpn.go.id/simpeg_money/profil/kelamin/021312.
- Kantor Badan Pertanahan (BPN). 2015. Sejarah Singkat Badan Pertanahan Nasional. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional.
- Mahmudi.2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi 2. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*, edisi IV penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Moehariono.2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Raja Grafindo persada.
- Renyowijoyo.2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Mitra Wacana Media.
- Syaiful. 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Modal Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. <https://www.ksap.org>.
- Soedarmayanti.2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sunyoto.2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bamdung : PT Refika Aditama

LAMPIRAN

1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA				
	STIESIA				
DIPLOMA 3 (Terakreditasi) • Manajemen Perpajakan • Akuntansi	STRATA 1 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi	STRATA 2 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi	STRATA 3 (Terakreditasi) • Ilmu Manajemen	PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (Terakreditasi)	
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218 Website : www.stiesia.ac.id E-mail : stiesia@stiesia.ac.id					


SURAT TUGAS
BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TAHUN 2021/2022

Nomor : Dip. 16/04/Ak/III/2022
Tanggal : 25 Maret 2022


Ketua Program Studi D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada:

Nama	: Dr. Lilis Ardini, S.E., M.Si., Ak., CA.
Bentuk Tugas	: Membimbing Penulisan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi
Nama Mahasiswa	: Diana Putri Hardianti
N.I.M.	: 19.1.03.02056
Alamat	: Bancang 5/8 Rt02/Rw03 Kelurahan Wates, Kec Magersari, Kota Mojokerto
Nomor Telepon/HP	: 085743801793
Judul Tugas Akhir	: Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value For Money pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto
Ketentuan	: a. Dosen pembimbing diperkenankan mengubah/ merevisi judul tugas akhir, apabila diperlukan. b. Batas waktu penulisan tugas akhir: 17 September 2022


Surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Ketua Program Studi
Akuntansi,

Dina Dini Widyawati, S.E., M.Si., Ak., CA

Copy:
- Arsip

 PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)
Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

2. Kartu Konsultasi Penulisan Tugas Akhir



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi):
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi









STRATA 3:
• Ilmu Manajemen

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax: (031) 5925514
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sby.dnet.net.id

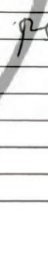
KARTU KONSULTASI BIMBINGAN
PENULISAN TUGAS AKHIR


Nama Mahasiswa : Diana Putri Hardianti
 N.P.M. : 19.1.03.02056
 Program Studi : D3 Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Dosen Pembimbing : Dr. Lilis Ardini, S.E., M.Si, Ak., CA.
 Materi Konsultasi :

No.	Tanggal	Paraf	Keterangan
1.	4-4-2022		Acc
2.	01-5-2022		Revisi bab 1-2
3.	6-6-2022		Acc bab 1-3
4.	07-6-2022		Revisi bab 3 & 4
5.	4-7-2022		Revisi bab 4 & 2
6.	07-7-2022		Revisi bab 4 & 2
7.	07-7-2022		Revisi bab 4 & 2
8.	13-7-2022		Acc tugas akhir
9.			
10.			
11.			
12.			


Batas Waktu Penulisan Tugas Akhir: 17 September 2022

Surabaya, 13 Juli 2022
 Dosen Pembimbing,

 Dr. Lilis Ardini, S.E., M.Si, Ak., CA.



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)
Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

3. Surat Ijin Studi Lapang



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi):
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3
• Ilmu Manajemen

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax, (031) 5925514
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sbj.dnet.net.id


Nomor : A. 19/01.4b/VI/2022 7 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset/Penelitian**

Kepada : Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Mojokerto
Jalan Pahlawan No. 45, Puri, Mojokerto

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa menjelang akhir studi mahasiswa Program Diploma Tiga STIESIA Surabaya diwajibkan menyusun karya ilmiah yang disebut laporan tugas akhir. Laporan tugas akhir tersebut merupakan laporan dari hasil riset/penelitian yang telah mahasiswa lakukan. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberi izin riset/penelitian kepada mahasiswa tersebut dibawah ini. Adapun mahasiswa yang kami maksud adalah sbb. :


Nama : Diana Putri Hardianti
N P M : 19.1.03.02056
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Bancang 5/8 RT02/RW03 Magersari, Kota Mojokerto
Judul Laporan Tugas Akhir : Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Value for Money pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto
Dosen Pembimbing : Dr. Lilis Ardini, S.E., M.Si., Ak., CA.

Perlu kami sampaikan bahwa maksud dan tujuan diadakan studi lizin riset/penelitian ini semata-mata untuk keperluan ilmiah dan akademik. Sedangkan waktu dan pelaksanaannya sepenuhnya kami serahkan kebijaksanaan Pimpinan disini. Selain tersebut di atas, kami mohonkan pula kepada mahasiswa yang sedang mengadakan izin riset/penelitian diberikan bimbingan petunjuk-petunjuk guna mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian atas segala perhatian, bantuan dan kerja sama yang baik, serta atas perkenan Bapak/Ibu/Saudara yang telah berperan serta menunjang keberhasilan pendidikan nasional dan khususnya untuk mendapatkan pengalaman praktis bagi mahasiswa tersebut di atas, dengan ini kami haturkan terima kasih.

Ketua,

Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

Tembusan Yth. :

- Mahasiswa ybs.
- Arsip

 PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)
Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

4. Surat Keterangan selesai Studi Lapangan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Pahlawan 45 Mojokerto, Telp. (0321) 396234 Fax. (0321) 396821 : www.bpn.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: S.KET-1166/35.16-100/IX/2021

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Diana Putri Hardianti
NPM : 1910302056
Program Studi : D3 Akuntansi

Telah menyelesaikan program praktik kerja lapangan di kantor kami sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2021. Selama melakukan kegiatan program praktik kerja lapangan, mahasiswa tersebut telah mematuhi peraturan kantor dan melaksanakan tugasnya dengan baik.


Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 30 September 2021
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama
Selaku Koordinator Subtansi
Keuangan dan Barang Milik Negara



CHARUL ANWAR, M.H.
NIP. 19880707-2011011 003

5. Berita Acara Tugas Akhir



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi):
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi









STRATA 2 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3:
• Ilmu Manajemen


Jalan Menur Pungungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5925514
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sby.dnet.net.id


BERITA ACARA
BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR


Nama Mahasiswa : Diana Putri Hardianti
N.P.M. : 19.1.03.02056
Program Studi : D3 Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value for Money* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto
Dosen Pembimbing : Dr. Lilis Ardini, S.E., M.Si., Ak., CA.
Materi Bimbingan :

No.	Tanggal	Paraf	Keterangan
1.	4 April 2022		Ace Judul
2.	31 Mei 2022		Revisi Bab 1 dan 2
3.	6 Juni 2022		Ace Bab 1 dan 2
4.	27 Juni 2022		Revisi Bab 3 dan 4
5.	4 Juli 2022		Revisi Bab 3 dan 4
6.	7 Juli 2022		Revisi Bab 4 dan Daftar Pustaka
7.	13 Juli 2022		Revisi Daftar Pustaka
8.	13 Juli 2022		Ace Tugas Akhir
9.			
10.			
11.			
12.			

Tanggal Pengajuan Tugas Akhir : 25 Maret 2022
Tanggal Penyelesaian Tugas Akhir : 13 Juli 2022
Telah Dievaluasi dengan Nilai :



 Ketua Program Studi D3 Akuntansi
 Dra. Dini Widyawati, M.Si., Ak., CA.


 Surabaya, 14 Juli 2022
 Dosen Pembimbing,
 Dr. Lilis Ardini, S.E., M.Si., Ak., CA.


PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)
 Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

CS Dipindai dengan CamScanner

6. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



STIESIA

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.
Jabatan : Wakil Ketua I

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Diana Putri Hardianti (19.1.03.02056)
Judul : Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Bahwa judul Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Dicatat/ Penelitian/Artikel diatas bebas dari plagiasi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2022
Wakil Ketua I



Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.

STIESIA

7. Surat Keterangan Presentase Plagiasi

